

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



OLEH

ANGELINA ANUL

2019110133

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2023

RINGKASAN

Kota Sumbergondo adalah sebuah kota yang terletak di Lokasi Bumiaji, Kota Batu, Wilayah Jawa Timur. Sebagai penerima dana desa di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, seharusnya menerapkan pajak atas pengelolaan dana desa. Strategi yang digunakan adalah mencerahkan subyektif melalui metode persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Konsekuensi dari penelitian ini adalah kota Sumbergondo melakukan pungutan dengan cara memungut atau menyimpan pungutan, menyimpan pungutan dan mengungkapkan pungutan. PPH Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah dua pajak di Desa Sumbergondo yang digunakan.

Kata kunci : Pajak, Pengelolaan, PPH

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang kota, maka pengaturan kemajuan kota diatur mengingat hasil akhir dari kesepakatan dalam rapat-rapat kota. Kemajuan kota bermaksud untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan kehidupan untuk bantuan pemerintah daerah setempat kota. Dalam pengawasan cadangan kota, semua gaji kota diperoleh dan dialihkan melalui rekening penyimpanan kota dan tidak diatur dalam Anggaran Pendapatan Dan Konsumsi Kota (APBDesa). APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan pemerintah kota yang tidak ditetapkan secara kaku untuk menyelesaikan proyek dan kegiatan yang masih mengudara untuk melakukan proyek dan kegiatan yang menjadi kekuatan kota.

Pemodal kota mengawasi dana kota yang mencakup mendapatkan gaji kota dan pengeluaran / dukungan sehubungan dengan pelaksanaan rencana keuangan kota. Mengingat Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 ditentukan bahwa modal kota sebagai perseorangan yang wajib memungut biaya pribadi (PPH) dan bea-bea lainnya, harus menyimpan semua turunan dan pungutan yang dikumpulkannya kedalam rekening penyimpanan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Indrihastuti dan Amaniyah (2020) pungutan merupakan salah satu kegiatan dalam siklus angsuran yang seharusnya sangat wajib diberikan oleh

negara dalam kaitannya dengan regulasi. Pungutan juga merupakan salah satu dari gaji negara. Menurut Herry Kamaroesid (2017) cadangan kota adalah cadangan mulai dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara yang diharapkan untuk kota-kota yang dipindahkan melalui Rezim/APBD Kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kemajuan, peningkatan wilayah dan daerah penguatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Risnaningsih (2017) memahami bahwa administrasi keuangan merupakan masalah yang sering diabaikan oleh pelaku bisnis UMKM

Diakui bahwa pemerintah kota lebih siap melihat kebutuhan daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memang memiliki cakupan persoalan yang lebih luas. Oleh karena itu, kemajuan provinsi yang diselesaikan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, yang diharapkan tujuan daerah setempat dan kebutuhan perbaikan pedesaan yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Berdasarkan pengaturan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) perda disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan kota berasal dari peruntukan APBD. Mengenai administrasi kota yang sudah habis disubsidi secara mandiri oleh kota, selanjutnya disinggung sebagai bagian cadangan kota. Sebagai besar alokasi dana desa digunakan untuk membangun dan menjalankan pemerintah desa. Kota memiliki kemampuan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah setempat untuk mencapai kemajuan dan penyampaian kemampuan keuangan yang setara.

Berdasarkan gambar diatas, ahli menganalisis “ pemeriksaan pelaksanaan tugas badan aset kota di Kota Sumbergondo, Kawasan Bumiaji, Kota Batu

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah Bagaimana Penerapan Pajak dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Menganalisis Penerapan Pajak dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1 Keuntungan hipotesis dapat memberi kontribusi kontemplasi sebagai informasi, informasi atau data yang bermanfaat, serta untuk menambah referensi masalah yang diteliti

2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Bisa memberi pemahaman yang lebih baik ketika menganalisis penerapan pajak dalam pengelolaan dana desa

b) Bagi Desa Sumbergondo

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap desa untuk penerapan pajak dalam pengelolaan dana desa

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan tambah penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. D. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Bahrin Nawawi, (2017). *Perpajakan Bendahara Desa*, Cetakan Pertama.
- Bohari. (2016). *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan kesebelas. Jakarta : Rajawali Pers
- Direktorat Jenderal Pajak (2012). “*Bendahara Mahir Pajak Ketentuan umum 1*”
- Herry Kasmaroesid. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Pertama.
<http://www.pajak.go.id>
- Indrihastuti Poppy, Amaniyah Mulimatul, 2020. Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Kota Malang. Jakarta : Mitra Wacana Media Jakarta Barat : Indeks
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA0)*, 7(1)
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moedarlis, F. T. (2016). *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa*.
- Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Hidayati. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 : Skripsi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN TA 2022, Dana Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Portal KPPN (2016). “*Bendahara Mahir Pajak : mengenal pajak yang Dipungut Oleh Bendahara*”. <https://portalkppn.com>. Diakses 25 Desember 2016
- Risnansih, R. 2017. Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan *Economic Entity Concept*. *Jurnal Analisis Akuntansi Dan Perpajakan*. 1(1). 41-50. doi: 10.25139/jaap.v1i1.97.
- Rudy Suhartono. (2013). *Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol 2, No, 1–10.
- Sari. N. Risya, Ribawanto. Heru, Said. (2015). Pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintah Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri), *Jurnal Administrasi Publik (JPA)*, Vol. 3, No. 11, Hal. 1880-1885

- Sofia, Irma Ayu. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pd. Pembangunan Kota Medan* : Skripsi
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenambelas. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa